Pancasila Sebagai Etos Bangsa Indonesia Dalam Memasuki Era Industrialisasi

Oleh: Rizal Mustansyir*)

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tidak ada bangsa manapun di dunia ini yang mampu menolak kehadiran teknologi demi pembangunan bangsa dan negara. Sebab penolakan itu berarti sebuah lonceng kematian bagi bangsa yang bersangkutan, perkembangan menjadi mandeg (paling tidak melambat). Kreativitas akan terpotong menjadi serpihan-serpihan kecil yang kurang berarti. Kehadiran teknologi memang dibutuhkan oleh setiap bangsa, terlebih lagi bagi bangsa yang sedang membangun seperti Indonesia. Namun teknologi itu sendiri sesungguhnya tidak lebih daripada sekedar alat, yang lebih penting adalah membangun mental manusianya, sehingga dampak negatif yang muncul dari pengaruh teknologi itu dapat diantisipasi secara tepat. Teknologi tinggi akan memunculkan peradaban dan kebudayaan baru yang disebut kebudayaan industrial. Dalam kebudayaan industrial inilah akan timbul berbagai persoalan yang memerlukan pemecahan atau jalan keluar yang dapat menyelamatkan bangsa Indonesia dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh teknologi. Dalam upaya pemecahan seberapa jauh nilai-nilai Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia dapat berperan. Sebab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang begitu pesat menjadikan berbagai norma seperti: hukum, etika dan agama juga mengalami perkembangan. Norma-norma itu harus dapat mengikuti perkembangan iptek kalau tidak ingin dikatakan usang (out of date). Rasionalisasi ataupun interpretasi terhadap norma-norma hukum, etika dan agama merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kebudayaan industrial memang menjanjikan kehidupan lebih baik di masa yang akan datang, namun hal itu lebih merupakan ukuran kuantitatip, lebih

*) Staf Pengajar pada Fakultas Filsafat UGM.

diletakkan pada aspek material. Ukuran kualitatip harus dapat mengimbangi itu semua agar bangsa Indonesia tidak terjebak dalam paham konsumeristis

II. Peranan Ilmu Pengetahuan & Teknologi Dalam Masyarakat Industrial.

A. Ilmu Pengetahuan & Teknologi

Kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (disingkat iptek) dalam beberapa dasa warsa belakang ini memang luar biasa. Temuan-temuan ilmiah di berbagai bidang seperti, informatika, bioteknologi, persenjataan, kedokteran menjadi bukti bahwa manusia ilmiah adalah manusia yang tidak pernah diam, selalu aktif dan tanggap terhadap persoalan-persoalan baru yang muncul dalam kehidupan manusia. Mereka terus menyibukkan diri dengan persoalan-persoalan dalam bidang masing-masing, sehingga spesialisasi ilmu berkembang pesat dan semakin menajam. Temuan-temuan ataupun pembaharuan yang dilakukan oleh para ilmuwan itu menurut T. Jacob, tidak hanya karena perkembangan kebutuhan manusia, tetapi juga rutin direncanakan oleh kelompok khusus yang bertugas untuk itu,[1] dan oleh karena otonomi iptek itu sendiri. Perkembangan ilmu dan teknologi menuntut perkembangan lanjut yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Sekali kita memilih untuk mengembangkan teknologi, maka kita terlibat dan terpacu untuk terus mengembangkan, tidak ada istilah untuk berhenti barang sejenak. Sebab teknologi itu tidak datang dengan sendirinya, ia datang karena sudah direncanakan dan diproses sedemikian rupa untuk menghasilkan nilai tambah. Nilai tambah itu melibatkan perhitungan ekonomis yang rumit, tidak sekedar untung atau rugi, tetapi gengsi bangsa juga turut dipertaruhkan. Dalam pidato pengarahan pada prasimposium peningkatan kualitas sumber daya manusia memasuki abad XXI, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menristek B.J. Habibie pernah menyatakan bahwa teknologi canggih itu tidak datang karena ada suatu Kepres atau ada suatu undang-undang atau ada suatu SK atau dengan memberi uang saja. Teknologi canggih itu datang karena ada manusianya yang mengalami

proses-proses nilai tambah tersendiri. Manusiapun mengalami proses nilai tambah.[2]

Perkembangan iptek menjadikan kebudayaan manusia mengalami perubahan yang amat cepat. Ada yang mencirikan dengan kebudayaan sosio-teknik, yaitu kebudayaan dimana ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan untuk mengendalikan tidak hanya alam, tetapi juga institusi-institusi sosial, seperti ekonomi, pendidikan, penelitian serta politik.[3] Pengendalian manusia atas institusi-institusi sosial melalui jasa iptek misalnya penggunaan telepon, komputer ataupun peralatan elektronik lainnya. Dalam bidang ekonomi, jasa juga mencakup penggunaan komputer dalam perbankan oleh para analist, kegiatan bursa saham melalui berbagai media elektronika, dan lainnya. Dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja mempunyai hubungan timbal balik, artinya iptek membantu pengembangan proses pendidikan disatu pihak, dipihak lain pendidikan (misalnya di perguruan tinggi) ikut andil dalam pengembangan iptek itu sendiri. Dalam bidang penelitian juga dimungkinkan pengaruh timbal balik yang serupa. Penelitian itu dapat menggunakan jasa teknologi canggih seperti peralatan modern untuk research di dalam perut bumi, di laut bahkan di ruang angkasa. Dipihak lain melalui penelitian juga dapat ditemukan teknologi baru yang dibutuhkan manusia dalam pelbagai kehidupan. Dalam bidang politik jasa iptek dapat dilihat secara jelas misalnya proses pemilihan presiden di Amerika yang menggunakan jasa media elektronik untuk mengumpulkan pendapat umum (poll). Pendek kata iptek membantu manusia untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam pelbagai bidang. Di samping itu juga iptek menunjukkan prestise suatu bangsa terhadap bangsa-bangsa lain. Semakin maju perkembangan iptek disuatu negara, maka semakin tinggi pula prestise bangsa yang bersangkutan. Contoh nyata negara Jepang yang dipandang hebat, tinggi, karena kemajuan ipteknya. Hampir semua negara ingin meniru keberhasilan Jepang dalam kemajuan iptek. Tetapi apakah iptek merupakan satu-satunya ukuran keberhasilan suatu bangsa?. Bagaimana hubungan antara teknologi, masyarakat dan kebudayaan di dalam kebudayaan Industrial itu?.

B. Hubungan Antara Teknologi Dengan Masyarakat Dan Kebudayaan

Kemajuan iptek erat terkait dengan apa yang disebut kebudayaan industrial. Sastrapratedja melihat paling sedikit ada tiga pandangan mengenai hubungan teknologi masyarakat.[4] Pandangan pertama melihat teknologi semata-mata sebagai teknologi, yaitu sebagai alat yang memungkinkan manusia mengerjakan lebih banyak. Penggunaan semata-mata tergantung pada manusia yang bisa mengubah sesukanya. Pandangan kedua melihat teknologi sebagai sesuatu yang samasekali otonom, memiliki hukum-hukumnya sendiri. Manusia akan dibentuk oleh teknologi yang mendiktenya. Pada umumnya pandangan ini melihat segi "dehumanisasi" dari teknologi.[5] Pandangan ketiga melihat teknologi sebagai kenyataan yang lebih luas, yaitu teknologi plus struktur. Teknik menyangkut bendanya sendiri baik perangkat keras, maupun ketrampilan sebagai perangkat lunaknya. Sedangkan struktur menyangkut bidang ekonomi, sosial politik dan kebudayaan.

Pandangan pertama memang meletakkan manusia sebagai subyek penentu atau pengendali teknologi. Namun dalam akselerasi iptek posisi manusia sebagai subyek penentu tidak selalu dapat dipertahankan. Masuknya teknologi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, lama kelamaan akan mempengaruhi pola pandangan ataupun cara berpikir dan bertindak masyarakat. Pandangan pertama ini hanya berlaku dalam pengembangan teknologi yang masih sederhana. Misalnya penggunaan kerbau untuk membajak sawah, di sini petani dapat sepenuhnya memperlakukan kerbau semata-mata sebagai alat. Tetapi dengan traktor, maka akan terjadi perubahan-perubahan cara berpikir dan bertindak petani, karena itu berkaitan erat dengan perhitungan ekonomis.

Sedangkan pandangan kedua yang melihat teknologi sebagai suatu yang sama sekali otonom atau memiliki hukum-hukumnya sendiri, cenderung mengarah pada dehumanisasi. Di sini teknologi benar-benar terlepas atau berdiri atas dasar logikanya sendiri. Sehingga bukan saja hukum manusia tidak dapat diterapkan terhadap teknologi, bahkan sebaliknya hukum teknologilah yang berlaku atas manusia. contohnya; manusia makan bukan karena lapar, tetapi karena waktu makan telah tiba. Di sini manusia dikuasai oleh teknologi waktu, jam.

Pandangan semacam ini banyak ditentang oleh penganut eksistensialisme [6] yang mencoba mengembalikan harkat manusia pada kebebasan individu. Proses massifikasi secara besar-besaran akibat penggunaan mesin-mesin untuk menggantikan tenaga manusia, membuat manusia individual tenggelam, yang dikenal hanya massa yang diarahkan untuk memproduksi barang-barang. Perkembangan teknologi yang tak terkendalikan karena ia memiliki hukum-hukumnya sendiri yang samasekali otonom, menurut Prof. T. Jacob [7], pada akhirnya akan mengarahkan teknologi itu untuk tujuan ekonomis semata. Perkembangan teknologi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi inilah yang akan membawa manusia ke arah ketidakseimbangan dengan lingkungan yang berakibat :

1. Lingkungan yang terkuras, karena eksploitasi yang berlebihan.
2. Pencemaran lingkungan yang mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung (misalnya: limbah industri yang mencemari pemukiman penduduk).

Bahaya-bahaya semacam ini telah menggejala dalam kehidupan masyarakat kita, terutama di kota-kota besar yang merupakan pusat-pusat industri. Upaya pemerintah untuk memejahijaukan perusahaan yang dianggap mencemari lingkungan (seperti: sungai, sumur, dan lain-lain) memang pantas dihargai, namun masih lebih banyak kasus serupa yang belum dapat diatasi. Kelemahan utama biasanya terletak pada koordinasi yang kurang baik diantara departemen-departemen pemerintah itu sendiri. Kasus perumahan elit Kapuk Indah di Jakarta merupakan bukti dimana lingkungan dikorbankan untuk kepentingan kelompok kecil orang berduit. Melalui teknologi tinggi daerah yang semula dihuni oleh binatang rawa dapat disulap menjadi perumahan mewah. Habitat margasatwa lenyap dalam sekejap, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara manusia, alam dan makhluk hidup lainnya.

Pandangan ketiga yang melihat teknologi sebagai teknik plus struktur mengasumsikan keterkaitan antara teknologi dengan struktur ekonomi, sosial politik dan kebudayaan. Teknologi berfungsi untuk memajukan perekonomian suatu bangsa. Oleh karena itu perhitungan secara ekonomis diperlukan untuk menentukan jenis teknologi apa yang layak untuk

dikembangkan disuatu negara. Sebagai contoh pengembangan teknologi pesawat terbang yang dilakukan di Indonesia didasarkan atas pertimbangan ekonomis untuk mengatasi kekurangan alat trasportasi yang dapat menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Disamping itu juga untuk memasukkan devisa bagi negara dengan menjual pesawat-pesawat terbang itu kenegara-negara lain. Kendatipun demikian ada yang berpandangan bahwa pemilihan itu secara ekonomis kurang tepat atau kurang menguntungkan. Indonesia adalah negara bahari, lebih tepat secara ekonomis dikembangkan pembuatan kapal laut daripada kapal terbang. Komponen-komponen pesawat terbang itu jauh lebih kompleks dan menuntut pengamanan kwalitas serta pengawasan kwalitas yang ekstra ketat.[8]

Keterkaitan antara teknologi dengan sosial-politik dimaksudkan agar pemilihan teknologi yang akan diterapkan di suatu negara (misalnya; Indonesia) seyogyanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial bangsa Indonesia. Banyak orang yang mempertanyakan penggunaan robot-robot dalam mekanisasi produksi di bidang industri tidak sesuai diterapkan di Indonesia. Alasannya cukup logis, tenaga kerja di Indonesia ini berlimpah dan murah. Oleh karena itu seyogyanya labour intensive lebih dikembangkan dari pada capital intensive. Tetapi melimpahnya tenaga kerja yang murah saja belum menjamin investor asing mau menanamkan modalnya di Indonesia. Situasi politik ikut menentukan minat investor, sebab hal ini berkaitan erat dengan policy atau kebijaksanaan pemerintah yang dapat mempengaruhi proses perdagangan. Misalnya; kemudahan dalam mengurus surat ijin usaha, sistem birokrasi yang tidak terlalu rumit dan menyulitkan pengusaha, kebijaksanaan pemerintah seperti Pakto, dan lain-lain.

Keterkaitan antara teknologi dengan kebudayaan jauh lebih jelas, karena beberapa ahli kebudayaan menyatakan bahwa teknik itu termasuk salah satu unsur kebudayaan[9]. Namun sebagaimana yang telah disinggung di atas, bahwa teknologi itu menjadikan kebudayaan berubah secara cepat, dan menciptakan apa yang dinamakan kebudayaan industrial melalui proses modernisasi dan industrialisasi itu sendiri menurut David Apter dapat dibedakan sebagai berikut: *"Adalah mungkin untuk*

mencoba modernisasi di negara tertentu tanpa banyak industri, tetapi adalah tidak mungkin industrialisasi tanpa modernisasi".[10] Proses industrialisasi menyangkut perkembangan ekonomi yang dapat didefinisikan sebagai konsekuensi ekonomis dari perubahan teknologis, terutama konsekuensi dari substitusi energi manusia dengan energi mesin dan elektronik. Tenaga manusia diganti dengan robot-robot atau komputer. Kesemuanya itu demi prinsip ekonomi dalam proses industrialisasi yaitu, rasionalitas, efektivitas dan ketelitian dalam kerja. Dalam proses industrialisasi yang bermaksud menghasilkan produk-produk teknologi tinggi secara besar-besaran, prinsip tersebut harus diperhatikan. Habibie secara lebih sederhana menyebutkan dengan istilah pengawasan dan pengamanan kualitas. Sedangkan Gunnar Myrdal menyebutkan ciri-ciri manusia industrial ada tiga belas, yaitu: (1) efficiency; (2) diligency; (3) orderliness; (4) punctuality; (5) frugality; (6) scrupilous honesty; (7) rationality in decision on action; (8) preparedness for change; (9) alertness to opportunities as they arise in a changing world; (10) energic enterprise; (11) integrity and self-reliance; (12) cooperativeness; (13) willingness to take the long view[11]. Ketigabelas ciri manusia industrial yang dikemukakan di atas itu sesungguhnya merupakan etos kerja manusia moderen. Kesemuanya berkaitan erat dengan sikap mental manusia sebagai subyek pembangunan. Bagaimana sikap mental manusia Indonesia di tengah arus kebudayaan industrial itu? sudahkah manusia Indonesia itu mencerminkan ciri perilaku masyarakat industrial? sejauh mana pandangan hidup bangsa Indonesia; Pancasila, mewarnai perilaku bangsa Indonesia di tengah kebudayaan industrial itu?. Persoalan-persoalan inilah yang perlu dibahas untuk membuktikan seberapa jauh bangsa Indonesia itu mampu menghadapi tantangan zaman di tengah proses modernisasi ini.

C. Dampak Negatif Perkembangan Iptek.

Kecepatan perkembangan iptek menurut Prof. Jacob dapat menimbulkan apa yang disebut technostress. Stress ini dapat berupa technoanxietas, yang membuat orang menentang adaptasi; dan technocenteredness, yang justru menyebabkan orang percaya betul pada teknologi.[12] Kedua macam stress ini tentu saja tidak diharapkan menghinggapi masyarakat Indonesia.

Stress yang pertama, technoanxietas, menjadikan kita bangsa yang tersisih dari tata pergaulan dunia. Dewasa ini hampir tidak ada bangsa manapun di dunia yang sepenuhnya menentang teknologi. Barangkali sekelompok kecil manusia yang secara ekstrim mendambakan kehidupan batiniah demi hidup abadi di dunia sana (akhirat) memang ada. Misalnya saja; penganut Taoisme, secara ekstrim cenderung hidup dekat dengan alam dan menjauhi sikap mengeksploitasi alam, karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip Wu-wei[13]. Ataupun kelompok biarawan yang mengasingkan diri dari dunia ramai untuk mendapatkan ketentraman batin, para sufi dalam tasawuf Islam yang beruzlah (mengasingkan diri dari dunia ramai). Kelompok semacam ini tidak dapat dikatakan mengidap technoanxietas, sebab sikap hidup yang mereka anut itu merupakan realisasi ajaran yang berorientasi dunia baka atau abadi (jeinseitig), bukan dunia fana (diesseitig). Stress yang berupa technoanxietas ini lebih tepat ditujukan pada penganut eksistensialisme yang secara tegas menentang teknologi yang menurut anggapan mereka menjadikan manusia kehilangan kepribadiannya, manusia individu tenggelam menjadi manusia massa.

Stress yang justru membuat orang percaya betul pada teknologi, technocenteredness, menjadikan kita bangsa yang terlalu yakin pada teknologi dapat memecahkan segala persoalan umat manusia. Pada hal dalam kenyataan hidup ini banyak sisi lain yang tidak dapat diatasi begitu saja dengan teknologi canggih. Seorang dokter ahli sekalipun yang dilengkapi dengan peralatan teknologi canggih, sering dihadapkan pada situasi gamang, yang menunjukkan ketidakberdayaannya di dalam mengatasi penyakit pasien seperti; AIDS, kanker, dan lain-lain. Pada akhirnya bersikap pasrah dan menunggu keajaiban yang terjadi atas pasiennya. Dengan demikian technocenteredness hanya merupakan keyakinan yang semu sifatnya. Pemujaan berlebihan atau pendewaan terhadap teknologi menjadikan suatu bangsa kehilangan pandangan hidup yang bercorak batiniah.

III. Pancasila Sebagai Etos Bangsa Dalam Masyarakat Industrial.

Bangsa Indonesia yang mempunyai pandangan hidup Pancasila berusaha menjadikan nilai-nilai Pancasila itu sebagai

tolok ukur ataupun patokan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang telah dikemukakan di atas. Bagaimana menjadikan nilai-nilai Pancasila itu sebagai etos bangsa ditengah proses industrialisasi? Sastrapratedja mengetengahkan beberapa aspek perkembangan masyarakat industrial, yang mengundang peran Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Pertama dalam masyarakat industrial terjadi perkembangan diferensiasi fungsional. Ini berarti kegiatan dalam masyarakat diorganisir, dikhususkan serta dikoordinasikan dalam sub-sistem yang majemuk dan secara relatif otonom. Dengan demikian masyarakat hidup dalam sub-sistem yang berbeda-beda, yang dikaitkan secara fungsional saja. Ini berarti masyarakat menghayati suatu sistem nilai yang majemuk. Pluralisme budaya merupakan salah satu sifat masyarakat industrial. Disinilah Pancasila dituntut untuk berperan sebagai ideologi pemersatu yang dapat mengatasi pelbagai segmentasi masyarakat sebagai akibat diferensiasi struktural dan fungsional, terutama dengan menerapkan prinsip keadilan sosial dan demokrasi.

Kedua, perkembangan masyarakat industrial selalu disertai dengan pelbagai gejala negatif. Suatu gejala yang banyak diamati ialah munculnya rasa keterasingan (alienation).[14] Hubungan- hubungan produksi dalam masyarakat industrial bersifat inpersonal, kepribadian menjadi luluh dalam gemuruhnya mesin-mesin produksi. Manusia merasa terasing dari hasil produksi yang dihasilkannya sendiri. Manusia hanya menjadi bagian dari totalitas sistem yang bersifat mekanis. Penggunaan teknologi canggih menuntut manusia untuk bersaing tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan teknologi itu sendiri. Disini Pancasila sebagai ideologi berperan memberi arah bagaimana menciptakan masyarakat yang lebih manusiawi yaitu arah untuk institusionalisasi nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab menghargai martabat manusia sebagai makhluk pribadi. Manusia bukan benda mati yang bisa diperlakukan secara sewenang-wenang. Manusia selalu ingin dihargai menurut kodrat kemanusiaannya. Oleh karena itu hubungan karyawan dan majikan di dalam proses industrialisasi perlu memperhatikan martabat kemanusiaan ini, sehingga teknologi yang dikembangkan benar-benar berwajah

manusiawi[15]. Hubungan yang demikian dinamakan hubungan industrial Pancasila.

Kendatipun demikian dibanyak perusahaan, hubungan industrial Pancasila ini baru merupakan *'lip service'* saja. Sering kita baca di mass media, ketidakharmonisan hubungan karyawan dengan majikan itu ditimbulkan oleh sikap perusahaan yang terlalu ekonomis. Pertimbangan kemanusiaan dinomorduakan. Gaji karyawan yang minim, aspek keamanan kerja yang tidak terjamin, pemutusan hubungan kerja secara sepihak sering mewarnai hubungan kerja di Indonesia. Banyak kasus menunjukkan bahwa karyawan selalu berada di pihak yang lemah manakala terjadi konflik diantara karyawan dengan perusahaan. Oleh karena itu campur tangan pemerintah terhadap konflik yang timbul diantara karyawan dengan perusahaan sangat diperlukan. Dalam hal ini pemerintah lebih berperan sebagai pihak yang netral, tolok ukur maupun patokan yang harus mendasari campur tangan pemerintah itu adalah nilai-nilai Pancasila. Seberapa jauh penerapan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu dalam hubungan antar karyawan dengan pimpinan perusahaan. Apakah perusahaan memberikan toleransi kepada karyawan untuk menjalankan ibadah pada saat tertentu, atau justru sebaliknya? Adakah tersedia sarana ibadah bagi karyawan di perusahaan tersebut?.

Demikian pula halnya dengan penerapan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menjamin hak-hak karyawan sebagai manusia. Apakah karyawan diperusahaan tersebut diperlakukan sesuai dengan harkat kemanusiaannya atau sebaliknya? Kekejaman atau bentuk penindasan, baik secara terang-terangan maupun terselubung, bagaimana cara pemerintah untuk mendeteksi hal-hal semacam itu. Dalam hal ini peranan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sangatlah penting. Pengaduan-pengaduan dari pihak karyawan atas perlakuan tidak manusiawi yang mereka alami harus dapat dibuktikan secara jelas. SPSI tidak boleh memihak kepada perusahaan karena mengharapkan hadiah atau semacamnya, karena ini sama halnya menjual nilai-nilai kemanusiaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka saja.

Sila Persatuan Indonesia merupakan upaya menjaga semangat nasionalisme di dalam hubungan kerja industrial itu. Pertentangan etnis, suku, agama atau yang lebih dikenal dengan istilah SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) harus dapat dihindarkan. Perlakuan yang berbeda antar karyawan pribumi dan non pribumi masih sering kita dengar pada perusahaan-perusahaan tertentu. Upah karyawan non pri lebih tinggi dari pada karyawan pribumi meski pekerjaannya sama, hanya lantaran pemilik modal perusahaan tersebut seorang non pri. Keadaan semacam ini akan merusak persatuan bangsa apabila dibiarkan begitu saja. Tentu saja hal sebaliknya tidak pula boleh diperlakukan, merendahkan seseorang lantaran ia seorang non pri.

Sila kerakyatan menjamin hak berbeda pendapat, dan perselisihan diselesaikan dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan. Penyelesaian konflik yang mungkin muncul dalam hubungan industrial antara karyawan dan pimpinan perusahaan, atau antara karyawan dengan perusahaan yang lain, ditempuh melalui jalan musyawarah. Setiap konflik yang timbul tidak langsung diselesaikan melalui pengadilan atau secara hukum, sedapatnya dilakukan pendekatan secara kekeluargaan terlebih dahulu antara pihak-pihak yang bertikai. Jika jalan musyawarah tidak berhasil barulah ditempuh upaya hukum.

Sila keadilan berarti memberikan kepada seseorang sesuai dengan haknya. Sebuah perusahaan yang tidak mau memberi cuti hamil kepada karyawati yang akan melahirkan berarti melanggar prinsip keadilan, sekaligus juga melanggar prinsip kemanusiaan. Demikian pula sebaliknya, karyawan dituntut untuk bersikap loyal kepada perusahaan sebagai pengejawantahan rasa wajib untuk mengimbangi hak-hak yang dimilikinya. Menuntut hak tanpa mengindahkan kewajiban akan menimbulkan disharmoni dalam hubungan industrial Pancasila.

Kelima sila Pancasila yang melandasi hubungan industrial ini merupakan suatu upaya untuk menciptakan proses industrialisasi yang berwajah manusiawi.

IV. KESIMPULAN

Pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa masyarakat industrial itu merupakan sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia. Banyak hal yang dipertaruhkan oleh bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat industrial, prestise bangsa, pemilihan teknologi yang berwajah manusiawi untuk menghindarkan dehumanisasi, dan yang lebih penting lagi yaitu, perkembangan kearah masyarakat industrial itu ikut mempengaruhi proses pencapaian identitas budaya bangsa Indonesia. Menurut Umar Kayam, proses pencapaian identitas budaya bangsa ini tidak terlepas dari pergeseran atau perkembangan berbagai sistem yang menyangga masyarakat atau bangsa, dilengkapi pula benturan dengan budaya bangsa lain. Apakah masyarakat industrial dapat mengancam pencapaian identitas nasional bagi bangsa Indonesia? Bahwa yang dimaksud dengan identitas nasional menurut rumusan Umar Kayam ialah suatu kualitas batiniah yang disetujui oleh sebagian besar lapisan masyarakat dalam suatu negara kebangsaan dan dapat mereka tuntut sebagai milik bersama mereka yang khas.[16] Ancaman itu tentu saja tetap ada, tetapi suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa kita sangat berkepentingan dengan teknologi ini untuk mempercepat lajunya roda pembangunan, persoalan lebih lanjut sebagai konsekuensi dari kepentingan negara terhadap pembangunan ini yaitu, apakah kita akan mengimpor teknologi -- lebih berperan sebagai konsumen teknologi -- ataukah kita akan menguasai sendiri teknologi tersebut? Gejala yang sekarang berkembang di Indonesia adalah upaya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Dengan demikian pengembangan, pemilihan dan penentuan teknologi yang cocok untuk dikembangkan di Indonesia ini sangat menentukan proses pencapaian identitas nasional. Hal ini tercermin dalam persepsi masyarakat terhadap pendidikan. Mereka yang berhasil meraih gelar kesarjanaan -- terlebih lagi dari disiplin ilmu eksak -- dianggap telah berprestasi dan merupakan kelompok elit intelektual. Semangat bersaing yang demikian tinggi ini hanya berkembang dalam masyarakat industrial. Bangsa Indonesia telah menunjukkan gejala semacam itu. Namun dipihak lain, budaya tradisional yang lebih merupakan etos bangsa tampaknya masih

cukup kuat mewarnai perilaku masyarakat kita. Misalnya; kurang menghargai waktu, rasa kebersamaan dalam bentuk gotong royong terutama di pedesaan, upacara-upacara tradisional. Kesemuanya ini membaur begitu saja antara nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai moderen. Sebagai contoh; perguruan tinggi yang masih menggunakan jasa pawang hujan di saat wisuda sarjana. Ini menunjukkan bahwa masyarakat industrial di Indonesia lebih tercermin pada aspek lahiriah, sedangkan aspek batiniahnya masih mencerminkan budaya lama. Kalau boleh diilustrasikan, manusia Indonesia pada kebudayaan industrial itu seperti orang mengenakan jas lengkap dengan dasi dan assesori moderen lainnya, tetapi di dalam dompetnya ada jimat penolak bala. Di kantornya yang serba moderen peralatannya, pada saat-saat tertentu dipasang sesajen berupa kembang untuk mengusir roh-roh jahat. Kita menerima itu semua dan menganggapnya sebagai milik kita bersama yang khas.

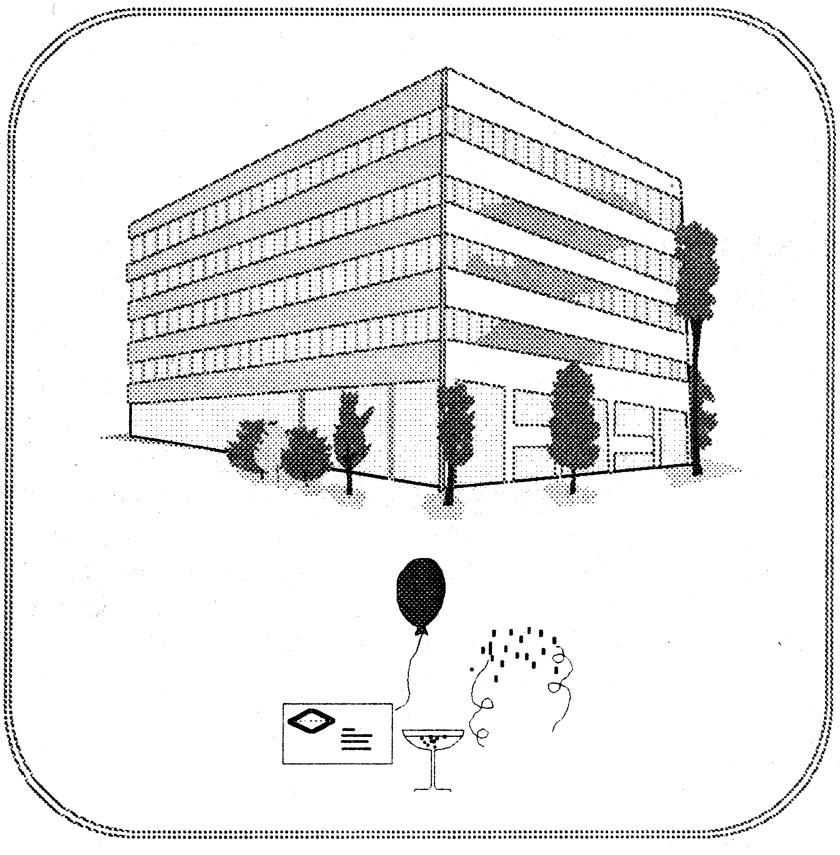

Catatan Kaki

1. T. Jacob, 1988, **Manusia Ilmu & Teknologi**, h.37, Tiara Wacana Yogyakarta

2. Habibie, 1992, Pidato pengarahan pada Prasimposium Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia memasuki abad XXI, h. 4, UMY, Yogyakarta. Yang dimaksudkan Habibie dengan nilai tambah disini adalah kadar iptek dan peranan sumber daya manusia yang terkandung dalam suatu produk. Contoh: Mobil Mercy harganya 250 juta rupiah beratnya 1000 kg, jadi satu kg rata-rata 250 ribu rupiah. Sebuah helikopter Puma, harganya 750 juta rupiah, beratnya 1500 kg, jadi rata-rata 500 ribu rupiah per kg. Nilai helikopter duakali lipat nilai Mercy, karena kadar iptek pada helikopter lebih tinggi.

3. Sastrapratedja M, 1991, Pancasila Sebagai Ideiologi Dalam Kehidupan Budaya, dalam **Pancasila Sebagai Ideologi** h. 156, editor: Oetoyo Usman & Alfian. BP-7 Pusat, Jakarta.

4. Ibid., h 158

5. T. Jacob., Opcit., h. 40

   Segi *'dehumanisasi'* dari teknologi ini diawali dengan ekploitasi terhadap alam semakin memuncak. Peralatan atau teknologi untuk ekploitasi makin berkembang. Mesin-mesin bertambah banyak, memasuki segala bidang dan sektor kehidupan. Dunia mesin mendesak manusia dalam ruang, pekerjaan dan hiburan. Ia menuntut pula cara kerja yang berbeda daripada yang sesuai dengan manusia. Inilah yang dikatakan dehumanisasi.

6. Muji Sutrisno, 1992, Eksistensialisme, dalam **Para Filsuf Penentu Gerak Zaman**, h. 99-100, Kanisius, Yogyakarta.

   Eksistensialisme memusatkan perenungan filsafatnya pada manusia konkrit, bukan manusia abstrak, konseptual dan universal, sebagaimana dimengerti oleh aliran filsafat sebelumnya. Eksistensialisme bertitik tolak pada paham kebebasan manusia yang dapat menentukan dan mengatur dirinya sendiri.

7. T.Jacob., 1992, **Strategi Pengembangan Ilmu Pengetahuan & Teknologi**, makalah dalam simposium Nasional Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia Indonesia Memasuki Abad XXI, h. 2 UMY, Yogyakarta.

8. Habibie., Opcit., h. 9.

   Menurut Habibie, setiap pesawat terbang itu terdiri sekurang-kurangnya 60.000 komponen, bahkan ada yang 100.000 komponen. Setiap komponen itu kualitasnya harus sama tinggi. Dua hal yang sangat menentukan proses pembuatan pesawat yaitu pengawasan kualitas dan pengamanan kualitas. Kedua aspek itu terkait erat dengan perhitungan ekonomis, yakni nilai tambah suatu produk.

9. Slamet S., 1983. **Sedikit Tentang Strategi Kebudayaan Nasional Indonesia**, h. 19, liberty, Yogyakarta.

   Koentjaraningrat menyebutkan ada 7 unsur kebudayaan, yaitu :

   a. Sistem religi dan upacara keagamaan
   b. Sistem Organisasi kemasyarakatan
   c. Bahasa
   d. Sistem pengetahuan
   e. Kesenian
   f. Sistem mata pencaharian hidup
   g. Sistem teknologi & peralatan

10. Sastrapratedja M., Opcit., h. 154.

Pernyataan itu mengandung arti bahwa modernisasi belum tentu diikuti oleh industrialisasi, sebab industrialisasi menuntut pengembangan teknologi canggih. Sebagai contoh proses modernisasi di Cina setelah revolusi kebudayaan belum secara langsung menerapkan teknologi canggih, tetapi baru tarap teknologi tepat guna.

11. Ibid., h. 154, dikutip dari Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations. Ketiga belas ciri manu- sia industrial itu diterjemahkan kurang lebih sbb: (1) efisiensi; (2) ketekunan/kerajinan; (3) keteraturan; (4) ketepatan waktu; (5) sikap hemat; (6) teliti/seksama; (7) rasionalitas dalam mengambil keputusan; (8) siap menghadapi perubahan; (9) pandai memanfaatkan peluang di dalam menghadapi perubahan dunia; (10) melaksanakan usaha secara enerjik; (11) integritas dan kepercayaan pada diri; (12) siap menjalin kerja sama; (13) mau memandang jauh kedepan.

12. T. Jacob., 1987, h. 10

13. To Thi Anh., 1984, **Nilai-nilai Budaya Timur & Barat** h. 14, Gramedia, Jakarta

Istilah Wu-Wei merupakan prinsip utama ajaran Taoisme yang arti harfiahnya, tidak mencampuri, lawan dari kekerasan. Dalam kitab Taoteh-ching Wu-Wei ini digambarkan sebagai berikut:

Ada yang mau mengalahkan dunia
Dan menjadikannya sesuci keinginannya
Saya yakin mereka tidak akan berhasil
Karena dunia adalah bejana milik langit
Yang tak dapat dibentuk oleh campur tangan manusia
Ia yang membuat itu akan merusaknya
Ia yang memilikinya akan kehilangan.

14. Magnis, S., 1992, **Filsafat Sebagai ilmu Kritis** h. 130, Kanisius, Yogyakarta.

Istilah keterasingan (entfremdung) dilontarkan oleh Marx untuk menggambarkan dehumanisasi yang terjadi dibawah sistem produksi kapitalis. Buruh bekerja bagi pemilik modal dan pekerjaan itu seakan paksaan baginya. Oleh karena itu buruh baru kerasan di luar pekerjaan dan dalam pekerjaan ia merasa di luar dirinya. Hubungannya dengan manusia lain seolah diracuni, pemilik modal dipandangnya sebagai penghisap, sesama buruh dipandang sebagai saingan, sehingga ia merasa terasing.

15. Sartono Kartodirdjo., 1990, **Kebudayaan Pembangunan Dalam Perspektif Sejarah**, h. 72, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Pengembangan teknologi berwajah manusiawi itu dikatakan oleh Prof. Sartono sebagai berikut:

> "Pada hakikatnya merupakan suatu diskusi mengenai pembangunan dan teknologi yang menyentuh soal preferensi nilai-nilai. Perencanaan pembangunan senantiasa mempunyai implikasi etis. Kalau kecenderungan teknokrasi menitik beratkan perkembangan ekonomis berupa kemajuan teknis yang telah melembaga, maka kemajuan moral menjadi cita-cita pendekatan manusiawi untuk mencapai kesejahteraan rakyat serta memperbaiki kualitas hidup dengan mewujudkan nilai-nilai dan kemajuan moral yang melembaga."

16. Umar Kayam., 1992, Proses Pencapaian Identitas Suatu Bangsa, dalam **KOMPAS**, Rabu 16 Desember 1992

DAFTAR PUSTAKA

Habibie, B.J., 1992 Pidato pengarahan pada Prasimposium Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Memasuki Abad XXI, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Jacob. T., 1988, **Manusia Ilmu & Teknologi,** Tiara Wacana, Yogyakarta.

Jacob. T., 1992, **Strategi Pengembangan Ilmu Pengetahuan & Teknologi**, makalah dalam simposium Nasional Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia Memasuki Abad XXI, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Magnis Suseno., 1992. **Filsafat Sebagai Ilmu Kritis,** Kanisius, Yogyakarta.

Muji Sutrisno., 1992, Eksistensialisme, dalam **Para Filsuf Penentu Gerak Zaman,** editor Muji S dan Budi H, Kanisius, Yogyakarta.

Sartono K., 1990. **Kebudayaan Pembangunan Dalam Perspektif Sejarah,** Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sastrapratedja M., 1991, Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya, dalam **Pancasila Sebagai Ideologi,** editor Oetoyo Usman dan Alfian, BP-7 Pusat.